



# **RENCANA KERJA ( RENJA )**

## **TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

## KATA PENGANTAR

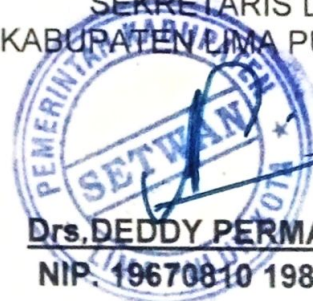
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan OPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan komitmen dan dukungan semua pihak yang terkait, semoga pelaksanaan tugas yang diemban Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan dengan sukses dan lancar dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Sarilamak, Desember 2023  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**Drs. DEDDY PERMANA, M.M**  
NIP. 19670810 198809 1 002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i	
Daftar Isi .....	ii	
Daftar Tabel.....	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang .....	I-1	
1.2 Landasan Hukum .....	I-8	
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-10	
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-10	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD .....	II-1	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	II-9	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	II-16	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-22	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-49	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD .....	III-2	
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-4	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....		IV-1
BAB V PENUTUP .....		V-1



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD	
	Tahun 2024 .....	I-3
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD	
	Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s.d Tahun	
	2022 Kabupaten Lima Puluh Kota .....	II-2
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	
	Kabupaten Lima Puluh Kota .....	II-11
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	
	Kabupaten Lima Puluh Kota .....	II-23
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku	
	Kepentingan Tahun 2024.....	II-50
Tabel 3.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD	
	Tahun 2024.....	III-5
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program	
	Prioritas Kabupaten.....	III-14
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	
	Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 ....	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan ,	
	Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	IV-22





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan Renja Perangkat Daerah.



**I. Persiapan penyusunan Renja Sekretariat DPRD,** dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2024. Adapun jadwal disusun sebagai mana disajikan pada Tabel 1.1 di halaman berikut.
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.



**Tabel 1.1**  
**Kalender Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024**

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																																



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																
1	Pelaksanaan Forum PD Bapelitbang yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Bapelitbang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Bapelitbang																																
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2024																																
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																
F	Penetapan Renja PD 2024																																
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																





No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																							
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																												
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																												
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua PD oleh Bapelitbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																												
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Bapelitbang																												



## **II. Penyusunan Rancangan Awal Renja**

Pada awal bulan Desember 2022 mulai dilakukan penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat DPRD 2024 oleh tim Renja Sekretariat DPRD, penyusunan berpedoman kepada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026. Penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat DPRD mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

## **III. Penyusunan Rancangan Renja**

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja Sekretariat DPRD kemudian dibahas dan disempurnakan dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah . Penyajian Rancangan Renja Sekretariat DPRD disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja.

Selanjutnya , Rancangan Renja yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Bapelitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Berdasarkan hasil verifikasi dari tim di Bapelitbang, maka Rancangan Renja disempurnakan dan hasil penyempurnaannya disampaikan kembali ke Bapelitbang.

## **IV. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah**

Forum perangkat daerah Sekretariat DPRD dilaksanakan tgl 3 maret 2023 di Sekretariat DPRD. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat



Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

## **V. Perumusan Rancangan Akhir**

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD.

## **VI. Penetapan**

Renja Sekretariat DPRD mempedomani Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya Renja Sekretariat DPRD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Sekretariat DPRD juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju.



Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan renja provinsi serta K/L.

Dalam hal penetapan Renja, Sekretariat DPRD menyerahkan Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang Kab.Lima Puluh Kota untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025;
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



- Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelola Keuangan Daerah
  14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025;
  17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
  19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Sekretariat DPRD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Sekretariat DPRD.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Sekretariat DPRD ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat DPRD dan bagian - bagian di Sekretariat DPRD.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD pada tahun 2024.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

#### **I. Pendahuluan**

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Sekretariat DPRD, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

#### **II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu**

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan sebagainya.





### III. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

### IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

### V. Penutup

Berisi ketentuan penutup.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD**

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2022 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2022 dan realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2022 disajikan Tabel 2.1 sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan**  
**Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2022**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	68.41%	100%	65.62%	65.62%	100%	89.14%	89.14%
4.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase teterselenggarany a kegiatan	100%	57.99%	100%	65.49%	65.49%	100%	74.49%	74.49%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
		administrasi keuangan perangkat daerah								
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	109.02	100%	88.74%	88.74%	100%	99,25%	99.25%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	73.76%	100 %	84.93 %	84.93 %	100%	86.23%	86.23%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	23.39%	100 %	66.21 %	66.21 %	100%	63.20%	63.20%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	38.31%	100%	57.17%	57.17%	100%	65.33%	65.33%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	80.04%	100%	58.67%	58.67%	100%	79.57%	79.57%
4.02.01.2.15	Kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase terselenggaranya kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	75.54%	100%	82.14%	82.14%	100%	85.89%	85.89%
4.02.01.2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase terselenggaranya kegiatan layanan administrasi DPRD	100%	26.34%	100%	51.09%	51.09%	100%	59.14%	59.14%
4.02.02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase terselenggaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>122.47%</b>	<b>100%</b>	<b>94.94%</b>	<b>94.94%</b>	<b>100%</b>	<b>84.85%</b>	<b>84.85%</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase terselenggaranya kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	80%	100%	83.33%	83.33%	100%	87.78%	87.78%
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terselenggaranya kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terselenggaranya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terselenggaranya kegiatan Peningkatan	100%	117.42%	100%	30.97%	30.97%	100%	82.80%	82.80%





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
		Kapasitas DPRD								
4.02.02.2.05	Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terselenggaranya kegiatan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	6.44%	100%	5.22%	5.22%	100%	37.22%	37.22%
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan kode etik DPRD	Persentase terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan kode etik DPRD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	83.33%	83.33%
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase terselenggaranya kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	15.38%	100%	100%	100%	100%	71.79%	71.79%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2022)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terselenggaranya kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	152.31%	100%	95.28%	95.28%	100%	115.86%	115.86%



Berdasarkan tabel 2.1 di atas evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Adapun program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, beberapa Sub kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Program **Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**, beberapa kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
  - Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
  - Pembahasan Kerjasama daerah
  - Fasilitasi Tugas DPRD

II. Program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program dan Sub kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, ada kegiatan yang pencapaian targetnya kurang dari 100% diantaranya :



- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Layanan Administrasi DPRD

Pada Sub kegiatan tersebut di atas, belum tercapainya target realisasi yang direncanakan disebabkan karena intensitas pekerjaan yang tinggi sehingga kegiatan tidak terlaksana.

2. Program **Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** pada umumnya semua kegiatan telah mencapai target, hanya beberapa kegiatan yang belum mencapai target di antaranya ;

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- Peningkatan Kapasitas DPRD
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait sesuai yang ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK



sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sehingga tidak ada penjelasan dalam tabel 2.2.



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU SETW AN	IKU KD	IKU PD (Sekret ariat DPRD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		√				ada	ada	ada	ada	ada		ada	ada	tercapai
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan		√				ada	ada	ada	ada	ada		ada	ada	tercapai





No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU SETW AN	IKU KD	IKU PD (Sekret ariat DPRD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)														
3	Terintegrasi		√				ada	ada	ada	ada	ada		ada	ada	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU SETW AN	IKU KD	IKU PD (Sekret ariat DPRD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD														
4	Indeks Kepuasan Pimpinan dan			√			80%	80%	80%	80%	91.42%		91.42%	91.42%	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU SETW AN	IKU KD	IKU PD (Sekretariat DPRD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Anggota DPRD Limapuluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan(%)														
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD			√			51	55	60	65	70		70	70	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat berdasarkan table 2.2 sesuai dengan IKD Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota.



- Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pencapaian indikator kinerja utama Sekretaris DPRD berupa indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan sudah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 91.42% atau sebanyak 32 orang menyatakan puas atas pelayanan pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD dan untuk nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD juga telah mencapai target 70.



## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

### 2.3.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap *stakeholdersnya*.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2022 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

#### 1. Pelayanan terhadap kegiatan rapat-rapat DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelayanan rapat-rapat DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal . Ini terbukti setiap jadwal rapat / persidangan yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir persidangan mulai dari penyiapan administrasi rapat, konsumsi sampai risalah persidangan.

#### 2. Pelayanan terhadap kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kunjungan Kerja DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal. Ini terbukti setiap jadwal kunjungan kerja yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan kunjungan kerja DPRD mulai dari penyiapan administrasi Kunjungan Kerja, mendampingi langsung ke lapangan, penyusunan laporan kunjungan kerja DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.



### 3. Pelayanan terhadap kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal . Ini terbukti setiap jadwal Bimtek yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan Bimtek DPRD mulai dari penyiapan administrasi Bimtek, mendampingi langsung kegiatan Bimtek, penyusunan laporan kegiatan Bimtek DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

### 4. Pelayanan terhadap kegiatan Reses Anggota DPRD ke daerah pemilihannya.

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Reses anggota DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal . Ini terbukti setiap jadwal Reses yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan Reses DPRD mulai dari penyiapan administrasi Reses, mendampingi langsung kegiatan Reses, penyusunan laporan kegiatan Reses DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

### 5. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan Anggota DPRD seperti melalui *Whatsapp group*.

Selain itu keberhasilan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2022 sudah cukup optimal didapat dari hasil tanya jawab berupa kuisioner dengan seluruh anggota DPRD, dimana untuk tahun 2022 ini, dari 35 orang anggota DPRD, 32 orang ( 91,42%) diantaranya menyatakan puas atas pelayanan-pelayanan kegiatan administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.





Untuk Informasi, ukuran dan skala pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan teknik analisis data berupa kuisioner.

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa kelemahan, adapun kelemahan itu antara lain:

1. Belum semua ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD yang memahami sepenuhnya tugas dan tanggungjawabnya sehingga adakalanya terjadi miskomunikasi dengan anggota DPRD.
2. Belum semua ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD yang mempunyai sumber daya yang memadai sehingga memperlambat pelaksanaan tugas anggota DPRD.
3. Adanya sebagian dari ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD terutama yang langsung terkait dengan pelayanan persidangan setengah hati melayani anggota DPRD sehingga berdampak pada ketidaknyamanan hubungan antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD itu sendiri.
4. Masih kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan persidangan seperti sound sistem dan kebersihan ruangan.
5. Dalam hal kebersihan ruang pribadi seperti kamar kecil sering menjadi polemik diantara anggota DPRD sehingga sering menjadi bahan pertanyaan bagi sebagian anggota DPRD didalam berbagai persidangan / rapat DPRD.

### **2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.**

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota DPRD sebagai berikut :



1. Belum optimalnya koordinasi antar bagian-bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani seluruh kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
2. Lemahnya sumber daya manusia yang mendukung pelayanan terhadap kelancaran tugas anggota DPRD.
3. Adanya ego sektoral masing-masing bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya rasa kebersamaan sesama aparatur dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani anggota DPRD
5. Kurangnya pemahaman masing-masing personil ASN maupun THL terhadap tugas dan fungsinya.
6. Adanya penempatan personil yang tidak sesuai keahliannya dengan tugas yang diembannya.
7. Belum optimalnya partisipasi ASN dan THL dalam mendukung kelancaran tugas anggota DPRD.

**2.3.3** Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).

Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan dan memfasilitasi DPRD dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka membahas suatu Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang merupakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Fasilitasi kegiatan dilakukan dalam bentuk penunjang kegiatan Rapat / Komisi / Alat Kelengkapan yang dibentuk untuk pembahasan suatu Rancangan Peraturan melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Untuk menyelaraskan dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk strategi sesuai dengan peran Sekretariat DPRD.



Adapun misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan rapat-rapat dan persidangan DPRD.
2. Memberikan pelayanan prima terhadap kunjungan kerja, reses dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
3. Memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pemerintah dan pembangunan oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
4. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan pengembangan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan fungsi dan tugas-tugas DPRD ;
6. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan prima terhadap pimpinan dan anggota DPRD ;
7. Meningkatkan perencanaan Sekretariat DPRD dalam mendukung pemberian pelayanan prima.

#### **2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD.**

Merujuk pada permasalahan yang ada, untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD di masa mendatang, tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam beberapa tahun mendatang adalah:

- Semakin strategisnya peran Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam memfasitasi kegiatan DPRD baik dalam persidangan/rapat maupun kegiatan yang terkait dengan reses, kunjungan kerja dan penyelenggaraan bimbingan teknis.
- Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*;



- Meningkatnya tuntutan anggota DPRD terhadap pelayanan yang maksimal, cepat dan tepat waktu.
- Arus Informasi yang semakin cepat dan penggunaan berbagai aplikasi teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi ASN maupun THL dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- Penyediaan lahan parkir kantor yang layak dan memadai untuk anggota DPRD dan tamu yang berkunjung ke kantor Sekretariat DPRD.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan system layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal untuk memfasilitasi kebutuhan informasi anggota DPR
- Adanya peluang meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dalam ruangan persidangan berupa peralatan sound sistem dan konsumsi serta diluar persidangan berupa kegiatan kunjungan kerja, reses dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.

### **2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.**

Sedangkan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 sebagai berikut :

#### **a. Rekomendasi**

Meningkatkan Kapasitas Sekretariat DPRD. Peningkatan Kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi



operasional Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan DPRD.

**b. Kebijakan Strategis**

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan Kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan system dan metode ( tata laksana ) operasional organisasi;
4. Pembaruan saran dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung financial dan non financial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Hasil Penjadwalan Badan Musyawarah di sosialisasikan ke semua pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel T-C.3 di bawah ini.



**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>32.719.848.215</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>16.851.699.955</b>	
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>310.177.800</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>1.419.000</b>	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	126.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	58.278.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	126.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				an nomenklatur pada SIPD RI
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	47.305.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	126.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	56.912.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	126.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	57.681.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	300.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Laporan	315.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah aporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah aporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Laporan	300.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase tertib administrasi		100	4.711.943.696	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase tertib administrasi		100	3.237.786.164	





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	<b>Daerah</b>	<b>Kuangan</b>				<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Kuangan</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangannya	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	35 orang/bulan	4.245.429.321	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangannya	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	35 orang/bulan	2.313.686.164	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 Dokumen	342.700.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 Dokumen	874.210.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	4800 Dokumen	39.503.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	4800 Dokumen	46.800.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Laporan	26.838.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Laporan	315.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD				SKPD	laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD				an nomenklatur pada SIPD RI
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 dokumen	24.799.600	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 dokumen	315.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	13 Laporan	22.342.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	13 Laporan	1.500.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	10.330.375	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	960.000	– Adanya perubahan indikator



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Prognosis Realisasi Anggaran	dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>640.000.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>95.477.300</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	Paket	160.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	Paket	70.680.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	8 orang	160.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	8 orang	12.774.800	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	18 orang	320.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	18 orang	12.022.500	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>2.122.600.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>840.466.100</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Paket	1.000.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Paket	381.535.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Paket	175.800.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Paket	72.321.600	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	-Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	300 Dokumen	60.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	-Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	300 Dokumen	5.700.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	386.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	241.675.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	139.234.500	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100	500.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100	48.352.900	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	0	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 unit	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 unit	48.352.900	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>513.500.000</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>416.959.600</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	13.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	5.100.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Jasa	Jumlah	Kab. Lima	24 Laporan	200.000.000	Penyediaan	Jumlah	Kab. Lima	24 Laporan	196.729.600	– Adanya



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Puluh Kota, Harau, Sarilamak			Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Puluh Kota, Harau, Sarilamak			perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	215.130.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang milik daerah yang berkategori baik</b>		<b>100</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang milik daerah yang berkategori baik</b>		<b>100</b>	<b>709.338.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan	16 Unit	750.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan	16 Unit	383.700.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	14 Unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	14 Unit	109.395.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Unit	191.763.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Unit	600.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Unit	24.480.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	<b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		<b>100</b>	<b>19.426.801.719</b>	<b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		<b>100</b>	<b>11.277.548.341</b>	





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang/bulan	19.020.636.719	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang/bulan	11.225.048.341	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Paket	343.165.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Paket	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check UP DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang	63.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check UP DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang	52.500.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		100	1.109.825.000	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		100	224.352.550	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	41.500.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	40.825.000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	10.810.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	627.500.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	189.908.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Paket	400.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Paket	23.634.550	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggara any Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>		<b>100</b>	<b>31.485.451.493</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggara any Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>		<b>100</b>	<b>8.962.260.900</b>	
	<b>Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggara any Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>100</b>	<b>6.935.500.000</b>	<b>Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggara any Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>100</b>	<b>1.598.177.000</b>	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 SK	10.500.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		Peraturan Daerah					Peraturan Daerah				SIPD RI
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	9 ranperda	6.750.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	13 Dokumen	1.527.933.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Per uu	35.000.000	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	5 Dokumen	7.103.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	120.000.000	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	63.141.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	20.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
											nomenklatur pada SIPD RI
	<b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>100</b>	<b>1.582.774.453</b>	<b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>100</b>	<b>130.647.900</b>	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	39.893.700	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	11.250.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	39.796.900	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	27.000.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	1.383.539.362	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	22.500.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	40.005.504	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	27.147.900	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	40.005.383	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	19.500.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	39.533.604	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	23.250.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
											ur pada SIPD RI
	<b>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>100</b>	<b>1.273.642.040</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>100</b>	<b>41.725.000</b>	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	30 orang	543.411.880	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Laporan	41.725.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	474.921.700	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau,	3 laporan	110.392.920	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau,	3 laporan	0	– Adanya perubahan indikator akibat



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sarilamak			Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sarilamak			pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	10.685.400	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	10.685.400	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	56.446.940	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	56.412.400	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 laporan	10.685.400	Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>100</b>	<b>5.941.666.500</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>100</b>	<b>938.785.000</b>	
						Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	0	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	3.501.755.500	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 Dokumen	488.122.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	24 Orang	137.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	0	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	96 Orang	319.791.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	96 Orang	174.550.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	468.120.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	43.240.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
											ur pada SIPD RI
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	0 dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	1.500.000.000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan dokumentasi DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 dokumen	258.413.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	<b>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>100</b>	<b>1.783.223.700</b>	<b>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>100</b>	<b>391.355.000</b>	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	483.223.700	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Laporan	24.010.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
											an nomenklat ur pada SIPD RI
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	21.625.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklat ur pada SIPD RI
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	1.000.000.000	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 Dokumen	345.720.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklat ur pada SIPD RI
	<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>100</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara	Kab. Lima Puluh Kota,	1 dokumen	5.000.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara	Kab. Lima Puluh Kota,	1 dokumen	0	– Adanya perubahan indikator



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		DPRD	Harau, Sarilamak				DPRD	Harau, Sarilamak			akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Laporan	20.000.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Laporan	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	<b>Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah</b>		<b>100</b>	<b>295.000.000</b>	<b>Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	
	Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Dokumen	265.000.000	Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen bahan komunikasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen bahan komunikasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		dan publikasi yang disusun					dan publikasi yang disusun				pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	<b>Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>100</b>	<b>13.648.644.800</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>100</b>	<b>5.861.571.000</b>	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	12.500.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	5.022.936.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Penyusunan laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi , Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Laporan	108.644.800	Penyusunan laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi , Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Laporan	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	40.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	0	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
		Tugas Badan Musyawarah					Tugas Badan Musyawarah				an nomenklat ur pada SIPD RI
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	1.000.000.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Dokumen	838.635.000	– Adanya perubahan indikator akibat pemutakhiran nomenklat ur pada SIPD RI
	<b>Jumlah</b>				<b>64.205.299.708</b>	<b>Jumlah</b>				<b>25.813.960.855</b>	



Berdasarkan Tabel 2.3 di atas tentang review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024, dimana pada rancangan awal RKPD tahun 2024 pagu indikatif yang tersedia adalah sebesar Rp 64.205.299.708,- sedangkan kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp. 25.813.960.855,-. adanya perbedaan antara kebutuhan anggaran dengan pagu indikatif yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD, dikarenakan adanya belanja yang belum diakomodasi dalam pagu indikatif. Sedangkan untuk indikator kinerja antara renstra dan sistim SIPD juga mengalami perbedaan yang diakibatkan oleh Kepmendagri –50-5889-tahun 2021.

#### **2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan**

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

#### **2.4.3. Temuan setelah proses**

Dalam proses ini Sekretariat DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 mengakomodir usulan dari alat kelengkapan yang masuk sehingga setelah ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD belum mencukupi.

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2024 ini secara umum tidak menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Sekretariat DPRD tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Renja Sekretariat DPRD. Sehubungan dengan keadaan diatas,





maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 tidak ada penjelasannya.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan







## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” dijelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Ada 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005 - 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Adapun ke empat pilar tersebut adalah :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan



Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 adalah sbb:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan
2. Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dengan berpedoman pada tema Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 termasuk 7 agenda rancangan Pembangunan Nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat DPRD belum terkait langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dimaksud .

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan dalam memfasilitasi DPRD dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka membahas suatu Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun



yang merupakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Fasilitasi kegiatan dilakukan dalam bentuk penunjang kegiatan Rapat/ Komisi/ Alat Kelengkapan yang dibentuk untuk pembahasan suatu Rancangan Peraturan melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Untuk menyelaraskan dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk strategi sesuai dengan peran Sekretariat DPRD. Adapun misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan rapat-rapat dan persidangan DPRD.
2. Memberikan pelayanan prima terhadap kunjungan kerja, reses dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
3. Memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pemerintah dan pembangunan oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
4. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan pengembangan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan fungsi dan tugas-tugas DPRD ;
6. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan prima terhadap pimpinan dan anggota DPRD ;
7. Meningkatkan perencanaan Sekretariat DPRD dalam mendukung pemberian pelayanan prima.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Acuan Sekretariat DPRD dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah .
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2024.



Sasaran :

1. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD untuk peningkatan kapasitas kinerja DPRD Lima Puluh Kota.
2. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi keberdayaan alat kelengkapan DPRD Limapuluh Kota.
3. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan fungsi pembentukan Perda .
4. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi peningkatan penyelenggaraan fungsi penganggaran yang berpihak kepada masyarakat
5. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan fungsi pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2024 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 .

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah, untuk tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ditetapkan 2 program, 17 kegiatan dan 75 Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi atas beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Sedangkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dibagi atas beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah
8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Berdasarkan uraian program dan kegiatan seperti tersebut diatas, dapat di urai menjadi sub-sub kegiatan. Ringkasan program, kegiatan dan sub Kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan





			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun



			<p>SKPD</p> <p>5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</p> <p>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD</p> <p>7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p>
		3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<p>1. Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p>
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p>1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</p> <p>3. Penyediaan Bahan</p>



			<p>Bacaan dan peraturan Perundang-undangan</p> <p>4. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
		<p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p>	<p>1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</p>
		<p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik</p> <p>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
		<p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya</p>



			<p>Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
		8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<p>1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</p> <p>2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</p> <p>3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</p>
		9. Layanan Administrasi DPRD	<p>1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</p> <p>2. Fasilitas Fraksi DPRD</p> <p>3. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</p> <p>4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD</p>



2.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3. Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan 4. Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
		2. Pembahasan Kebijakan Anggaran	1. Pembahasan KUA dan PPAS 2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Pembahasan APBD 4. Pembahasan APBD Perubahan 5. Pembahasan Laporan Semester 6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
		3. Pengawasan Penyelenggaraan	1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang



		Pemerintahan	<p>Pemerintahan dan Hukum</p> <p>2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</p> <p>3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</p> <p>4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</p> <p>5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</p> <p>6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>7. Pengawasan Penggunaan Anggaran</p> <p>8. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</p>
		4. Peningkatan Kapasitas DPRD	<p>1. Orientasi DPRD</p> <p>2. Pendalaman Tugas DPRD</p> <p>3. Penyediaan Kelompok</p>



			<p>Pakar dan Tim Ahli</p> <p>4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</p> <p>5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</p> <p>6. Penyusunan Program Kerja DPRD</p> <p>7. Publikasi dan Dokumentasi DPRD</p>
		5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<p>1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah</p> <p>2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</p> <p>3. Pelaksanaan Reses</p>
		6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<p>1. Penyusunan Kode Etik DPRD</p> <p>2. Pengawasan Kode Etik DPRD</p>
		7. Pembahasan Kerjasama Daerah	<p>1. Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah</p> <p>2. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi</p>
		8. Fasilitasi Tugas DPRD	<p>1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</p> <p>2. Penyusunan laporan</p>



			Kinerja DPRD  3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah  4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
	2	17	75

Dengan demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2024 menjadi 2 program 17 kegiatan dan 75 Sub kegiatan

Terkait dengan identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 sebagai telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal Bab II pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian pada Sekretariat DPRD tidak terkait langsung Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga tidak ditemukan adanya permasalahan untuk dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Sekretariat DPRD.





**Tabel 3.2****Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai(-) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Belum tercapai	Belum Terpenuhinya pagu anggaran yang layak dalam memenuhi kebutuhan lembaga DPRD berupa sarana dan prasarana kegiatan tersebut	
2	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Belum tercapai	-	
	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belum tercapai	belum Terpenuhinya pagu anggaran yang layak dalam memenuhi	



			kebutuhan lembaga DPRD berupa sarana dan prasarana kegiatan tersebut	
3	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum tercapai	-	
	Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Belum tercapai	belum Terpenuhinya pagu anggaran yang layak dalam memenuhi kebutuhan lembaga DPRD berupa sarana dan prasarana kegiatan tersebut	





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra PD tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dengan 2 Program, 17 Kegiatan dan 75 Sub Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 3.1 pada Bab III sebelumnya. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bapelitbang berikut target kinerja dan indikasi anggaran Tahun 2024 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1 di halaman berikut:



TABEL 4.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DPRD KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024																
1	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						25.813.960.855,00							72.134.970.072,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						25.813.960.855,00							72.134.970.072,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						25.813.960.855,00							72.134.970.072,00	
1,	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	16.851.699.955,00						-	37.645.015.433,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	1.419.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	325.177.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	126.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	126.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		58.278.600,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	126.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		47.305.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	126.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		56.912.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	300.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		57.681.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	315.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	300.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	3.237.786.164,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	4.712.976.734,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2.313.686.164,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		4.245.429.321,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	874.210.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		342.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4800 Dokumen	46.800.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		39.503.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	315.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		26.838.300,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	315.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		24.799.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				13 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		22.342.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	960.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.363.413,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	95.477.300,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	685.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	70.680.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		165.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				8 Orang	12.774.800,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					18 Orang	12.022.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		340.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	840.466.100,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	2.262.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	381.535.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					1 Paket	72.321.600,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		195.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	5.700.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	241.675.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		406.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	139.234.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	-			100 %	48.352.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	48.352.900,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	416.959.600,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	538.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.100.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		38.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	196.729.600,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	215.130.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	-			100 %	709.338.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	3.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	383.700.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	109.395.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	191.763.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	24.480.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			100 %	11.277.548.341,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	24.072.035.899,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	11.225.048.341,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		23.775.795.899,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				0 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		226.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	52.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	-			100 %	224.352.550,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.199.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONA		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		45.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	10.810.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		45.825.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	189.908.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		657.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				2 Paket	23.634.550,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	-			100 %	8.962.260.900,00						-	34.489.954.639,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRDPersentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-			100 %	1.598.177.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	7.665.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				9 Dokumen	1.527.933.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		6.750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	7.103.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	63.141.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			100 %	130.647.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.741.048.897,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	11.250.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		43.883.070,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	27.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		43.776.590,00	SEKRETARIAT DPRD





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	22.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.521.890.298,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	27.147.900,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		44.006.054,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	19.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		44.005.921,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	23.250.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		43.486.964,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemernintahan	-			100 %	41.725.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.959.006.262,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	41.725.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		597.753.086,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		522.413.870,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		121.432.212,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.753.940,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				0 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lima Puluh Kota, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		11.753.940,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembanngan Masyarakat Madani	-		620.091.634,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembanngan Masyarakat Madani	-		62.053.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembanngan Masyarakat Madani	-		11.753.940,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	-			100 %	938.785.000,00			-	Meningkatkan an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembanngan Masyarakat Madani	-	-	6.241.666.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembanngan Masyarakat Madani	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2 Dokumen	488.122.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		3.501.755.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		137.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				96 Orang	174.550.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		319.791.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Dokumen	17.700.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		468.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi	DPRD													
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	258.413.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-			100 %	391.355.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	1.783.223.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	24.010.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		483.223.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				12 Dokumen	21.625.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	345.720.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	770.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	-			100 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	305.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		270.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	-			100 %	5.861.571.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-	-	14.024.509.280,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	5.022.936.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		12.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		119.509.280,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	838.635.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Masyarakat Madani	-		1.010.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			J U M L A H					25.813.960.855,00							72.134.970.072,00	





**Tabel 4.2**  
**Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2024**

N o	Bidang Urusan	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2024		Tahun 2025	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu Indikatif ( Rp.)	Jumlah	Total Pagu Indikatif ( Rp. )	Pagu Indikatif ( Rp.)	
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2	25.813.960.855	74.091.973.072	17	25.813.960.855	74.091.973.072	

Berdasarkan tabel 4.3 di atas maka rencana kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD tahun 2024 adalah sebesar Rp. 25.813.960.855,- untuk 2 program dan 17 kegiatan, sedangkan untuk pagu tahun 2025 diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi Rp. 74.091.973.072,-.



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Namun demikian, acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah Renstra ( Rencana Strategis ) Sekretariat DPRD tahun 2021-2026.

Renja Sekretariat DPRD memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Sekretariat DPRD, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Sekretariat DPRD dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2024, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.



Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal Desember 2023

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Drs. DEDDY PERMANA, M.M**  
**NIP. 19670810 198809 1 002**

